

PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NONLABA BERDASARKAN ISAK 35 (STUDI KASUS GEREJA MASEHI INJILI DI SANGIHE TALAUD (GMIST) SE KECAMATAN MANGANITU)

Deriana Odameng¹, Mohammad Rizky Yahya², Nur Afni Karim³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara

Korespondensi: derianaodameng2003@gmail.com

Info Artikel

Riwayat artikel:

Diterima 28 Agustus 2025

Direvisi 30 Agustus 2025

Diterima 31 Agustus 2025

Kata kunci:

ISAK 35, entitas nonlaba, laporan keuangan, gereja, penelitian kualitatif.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan laporan keuangan entitas nonlaba berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pada Gereja Masehi Injili di Sangihe Talaud (GMIST) se-Kecamatan Manganitu. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja sebagai entitas nonlaba yang memperoleh sumber pendanaan dari jemaat maupun donatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *field research* dan paradigma konstruktivisme untuk menggali makna subjektif dari para pengelola keuangan gereja. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap tiga gereja GMIST yang menjadi lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengelola keuangan gereja terhadap ISAK 35 masih terbatas. Laporan keuangan yang disusun pada umumnya masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi struktur standar ISAK 35. Faktor utama yang menjadi kendala adalah minimnya sosialisasi dan pelatihan dari pihak sinode, keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi, serta hambatan dalam penggunaan teknologi pencatatan keuangan. Meski demikian, penelitian menemukan adanya antusiasme dari pengelola untuk menerima pelatihan dan mengadopsi sistem keuangan berbasis ISAK 35.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya program pendampingan berkelanjutan dan pengembangan sistem pencatatan digital yang mudah diakses guna mendukung penerapan standar akuntansi di tingkat gereja lokal. Dengan demikian, penerapan ISAK 35 pada GMIST Manganitu masih berada pada tahap awal, namun memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui dukungan institusional dan penguatan kapasitas pengelola keuangan.



©2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh PT. Meka Insight Publisher. Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Entitas berorientasi nonlaba merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat dengan tujuan sosial, budaya, pendidikan, agama, maupun kemanusiaan, bukan untuk memperoleh keuntungan finansial (Purba et al., 2023). Berbeda dengan entitas bisnis, entitas nonlaba memiliki karakteristik khusus terutama dalam memperoleh sumber daya. Sumber daya tersebut sebagian besar berasal dari sumbangan donatur maupun anggota, tanpa mengharapkan imbalan atas kontribusinya (Wirakrama et al., 2023). Beberapa contoh entitas nonlaba antara lain organisasi keagamaan, panti asuhan, sekolah negeri, maupun organisasi sosial.

Dalam praktik pengelolaan keuangan, entitas nonlaba perlu mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan transparan dan akuntabel. Akuntansi sendiri merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi pengguna informasi. Pada tahun 1997, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengatur entitas nonlaba melalui PSAK 45. Namun, sejak 11 April 2019, standar tersebut digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. ISAK 35 memberikan pedoman yang lebih spesifik terkait penyajian laporan keuangan bagi entitas nonlaba (DSAK IAI, 2018).

ISAK No. 35 paragraf 9 dan 10 menekankan pentingnya penyampaian informasi keuangan yang sesuai dengan PSAK 1, termasuk susunan laporan keuangan dan penyesuaian deskripsi pos-pos tertentu. Bagi rumah ibadah, penerapan ISAK 35 menjadi penting agar laporan keuangan dapat

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas secara relevan dan bermanfaat bagi pengguna (Indrawan et al., 2023). Namun, di Indonesia penerapan ISAK 35 pada rumah ibadah masih tergolong rendah. Hal ini umumnya disebabkan keterbatasan pemahaman pengurus gereja mengenai akuntansi dan penyusunan laporan keuangan (T. F. Amelia et al., 2023).

Gereja, sebagai salah satu entitas nonlaba, tidak hanya berfokus pada kegiatan keagamaan melainkan juga kegiatan sosial dengan berbagai sumber pendanaan. Oleh sebab itu, gereja dituntut untuk mengelola keuangannya dengan baik melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai standar. Laporan keuangan yang baik diperlukan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengurus dalam mengelola dana, serta menjadi sarana pertanggungjawaban kepada jemaat maupun donatur (Wirakrama et al., 2023; Yahya et al., 2025). Dengan demikian, kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam penyajian laporan keuangan menjadi aspek penting yang harus dijunjung tinggi.

Gereja Masehi Injili di Sangihe Talaud (GMIST) merupakan salah satu gereja beraliran Protestan yang berada di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sejak 25 Mei 1950, GMIST telah bergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dalam tata kelolanya, GMIST memiliki rencana dan realisasi kegiatan, salah satunya terkait penyusunan laporan keuangan sesuai buku panduan pelayanan, pengawasan, dan tata kelola perbendaharaan GMIST yang disusun oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ). Berdasarkan hal tersebut, penting untuk meneliti sejauh mana penerapan ISAK 35 dilakukan dalam laporan keuangan GMIST, khususnya di wilayah Kecamatan Manganitu. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: *"Penerapan Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK No. 35 di Gereja Masehi Injili di Sangihe Talaud (GMIST) se-Kecamatan Manganitu."*

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada upaya mengkaji tingkat pemahaman, kesiapan, serta penerapan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan oleh gereja-gereja Masehi Injili di Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Permasalahan yang diteliti meliputi: bagaimana tingkat pemahaman pengelola keuangan gereja terhadap ISAK 35, bagaimana penerapan standar tersebut dalam praktik penyusunan laporan keuangan, serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana dukungan dari sinode atau lembaga gereja dalam mendorong penerapan ISAK 35 di tingkat gereja lokal, serta mengevaluasi efektivitas dan kesiapan gereja-gereja di Kecamatan Manganitu dalam mengadopsi aplikasi laporan keuangan berbasis ISAK 35 yang dikembangkan oleh STIE SULUT sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaporan keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pengelola keuangan gereja Masehi Injili di Kecamatan Manganitu terhadap ketentuan ISAK 35, menganalisis penerapan standar tersebut dalam penyusunan laporan keuangan, mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi, mengevaluasi dukungan sinode atau lembaga gereja dalam mendorong implementasi ISAK 35, serta menilai kesiapan gereja dalam mengadopsi aplikasi laporan keuangan berbasis ISAK 35 yang dikembangkan oleh STIE SULUT sebagai solusi peningkatan kualitas dan konsistensi pelaporan. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai penyusunan dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan pada entitas nonlaba, khususnya gereja GMIST di Kecamatan Manganitu. Selain itu, manfaat praktisnya antara lain dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak gereja dalam memperbaiki dan mempermudah penyusunan laporan keuangan sesuai standar, serta memberikan pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait.

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang bertujuan untuk memberikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi. Dalam hal ini, akuntansi tidak hanya berfokus pada pencatatan, tetapi juga dituntut untuk memahami lingkungan ekonomi di sekitarnya. Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan semakin disadari oleh banyak pihak, baik pada entitas yang berorientasi laba maupun nonlaba (Piring et al., 2023). Secara mendasar, akuntansi berfungsi untuk menyajikan berbagai informasi dan memberikan jawaban terkait aktivitas keuangan, sehingga dapat mendukung terciptanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya suatu entitas (Setiadi, 2021).

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, serta arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan

kepadanya (Siregar et al., 2023). Dalam konteks bisnis maupun entitas nonlaba, laporan keuangan menjadi instrumen penting karena merupakan penyajian terstruktur dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Melalui laporan keuangan, entitas dapat menyediakan informasi pada periode tertentu yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan (Turangan et al., 2022).

Laporan keuangan, atau *financial statement*, merupakan dokumen yang menyajikan data keuangan organisasi dan digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menentukan keputusan ekonomi (Reza et al., 2024). Informasi yang disajikan mencakup status keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang tidak hanya bermanfaat bagi pengguna laporan, tetapi juga menunjukkan akuntabilitas manajemen dalam mengelola sumber daya. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai sejauh mana manajemen mencapai tujuan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan (Sukmantoro & Ekawati, 2021).

Entitas nonlaba merupakan entitas yang memiliki tujuan utama bersifat nonkomersial dan tidak dimaksudkan untuk mencari laba, melainkan diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang sebagian besar berasal dari donatur atau anggota (Butar Butar & Purba, 2022). Sejak era reformasi, peran entitas nonlaba semakin penting dalam kehidupan masyarakat, karena keterlibatannya yang luas dalam berbagai aktivitas sosial dengan tujuan membantu masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu secara ekonomi (S. Amelia & Bharata, 2022). Menurut ISAK No. 35 (2018: 35.1), entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari pihak pemberi tanpa mengharapkan imbalan ekonomi yang sebanding, baik yang dimiliki pemerintah maupun sektor swasta, sehingga menegaskan bahwa orientasi utamanya bukanlah keuntungan finansial (Piring et al., 2023). Jenis-jenis entitas nonlaba antara lain akuntansi tempat peribadahan seperti masjid, gereja, pura, dan wihara; akuntansi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM); akuntansi yayasan; akuntansi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi; serta akuntansi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang disahkan pada 11 April 2019 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, hadir sebagai pedoman baru dalam penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. Sebelumnya, pengaturan pelaporan keuangan organisasi nonlaba mengacu pada PSAK 45, namun salah satu perubahan mendasar dalam ISAK 35 adalah klasifikasi aset netto yang diubah dari aset netto terikat permanen dan temporer menjadi aset netto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan. ISAK 35 menegaskan ketentuan pelaporan yang relevan bagi entitas nonlaba, mencakup pengungkapan pendapatan, pengeluaran, aset, serta kewajiban, dengan tujuan utama menyediakan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan seperti donatur, anggota, maupun masyarakat (Reza et al., 2024). Beberapa poin penting dalam ISAK 35 meliputi ruang lingkup PSAK 1 yang mencakup entitas nonlaba dengan penyesuaian terminologi, pemberian interpretasi tambahan karena PSAK 1 tidak memberikan pedoman khusus bagi entitas nonlaba, serta penekanan pada karakteristik entitas nonlaba yang memperoleh sumber daya dari pihak yang tidak mengharapkan pengembalian langsung. Selain itu, pengguna laporan keuangan entitas nonlaba pada umumnya berfokus mengevaluasi akuntabilitas manajemen dalam penggunaan sumber daya dan memperoleh informasi yang mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Penting pula dicatat bahwa ISAK 35 berlaku bagi entitas nonlaba tanpa memandang bentuk badan hukum yang digunakan.

Gereja merupakan salah satu entitas nonlaba yang mengelola keuangan serta sumber daya jemaat sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai lembaga keagamaan. Berdasarkan badan hukumnya, gereja termasuk dalam kategori yayasan gerejawi karena didirikan melalui surat pendirian gereja (Piring et al., 2023). Selain berfungsi sebagai tempat ibadah umat Kristen, gereja juga menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, seperti sekolah minggu, ibadah pemuda, hingga pemberkatan pernikahan (Piring et al., 2023). Di Sulawesi Utara, yang dikenal sebagai “kota seribu gereja” karena mayoritas penduduknya beragama Kristen, salah satu gereja yang memiliki peranan penting adalah Gereja Masehi Injili di Sengihe Talaud (GMIST). GMIST merupakan bagian dari denominasi Kristen Protestan yang juga menjadi anggota Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Dalam struktur organisasinya, GMIST memiliki Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) yang bertugas menyusun rencana, melaksanakan realisasi kegiatan, serta mengelola pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan gereja.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap makna, pengalaman, serta proses yang dialami oleh partisipan dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2007). Data dikumpulkan langsung di lapangan untuk menangkap dinamika penerapan ISAK 35 dalam konteks gereja, khususnya pada Gereja Masehi Injili di Sangihe Talaud (GMIST) se-Kecamatan Manganitu. Lokasi penelitian dipilih secara spesifik agar objek dan sasaran penelitian terlihat jelas serta mempermudah proses pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap bendahara jemaat, Komisi Pengawasan Perbendaharaan Jemaat (KPPJ), serta Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ). Sedangkan data sekunder berasal dari catatan internal gereja, seperti laporan anggaran belanja, buku kas umum, tata kelola perbendaharaan GMIST, serta literatur pendukung lainnya (Turangan et al., 2022).

Paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivisme, karena paradigma ini menekankan pada pemahaman makna subjektif yang dibangun individu atau kelompok dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Paradigma ini sesuai untuk menggali bagaimana pengelola keuangan gereja, ketua majelis, maupun pihak sinode membangun makna terkait penerapan ISAK 35 dalam laporan keuangan gereja (Creswell, 2007). Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik berdasarkan teori Miles et al. (2014) dan Creswell (2007) melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik member check sebagaimana disarankan oleh Miles et al. (2014), dengan melibatkan partisipan dalam memverifikasi hasil analisis agar sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka. Proses penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari persiapan, pengumpulan data, reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, hingga penyusunan laporan penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan ISAK 35 pada gereja-gereja GMIST di Kecamatan Manganitu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengelola keuangan gereja terhadap ISAK 35 masih sangat rendah. Berdasarkan wawancara dengan bendahara di tiga gereja GMIST di Kecamatan Manganitu, tidak ada satu pun informan yang mengetahui atau memahami secara utuh mengenai standar ini sebelum diwawancarai oleh peneliti. Informasi yang diperoleh sepenuhnya baru diketahui melalui proses penelitian. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan informasi antara standar akuntansi yang berlaku dengan praktik pelaporan keuangan di gereja. Salah satu informan menyatakan, *“Nah itu ibu belum tau dan belum paham bagaimana itu ISAK 35”* (Wawancara, Gereja Eben Haezer Manganitu). Pernyataan serupa juga muncul pada informan lain, seperti *“Belum pernah dengar tentang ini selama ibu jadi bendahara disini”* (Wawancara, Gereja E.T Steller Barangka).

Minimnya pemahaman ini erat kaitannya dengan ketiadaan sosialisasi dan pelatihan dari pihak sinode sebagai lembaga induk. Ketiga gereja yang menjadi objek penelitian tidak pernah memperoleh arahan atau panduan resmi terkait penerapan ISAK 35. Meskipun ada informan yang mengaku pernah mengikuti pelatihan laporan keuangan, namun substansinya tidak secara jelas merujuk pada ISAK 35. Kondisi ini digambarkan oleh pernyataan informan: *“Belum ada sosialisasi jemaat menggunakan laporan keuangan sesuai ISAK 35”* (Wawancara, Gereja Eben Haezer Manganitu) dan *“Kalau tentang itu ISAK 35 memang sepertinya belum ada sosialisasi dari sinode”* (Wawancara, Gereja Nazaret Siha). Ketidadaan bimbingan dari sinode memperkuat hambatan struktural dalam penerapan standar akuntansi di lingkungan gereja.

Selain itu, pola pelaporan keuangan yang berlaku di gereja-gereja GMIST Manganitu masih sangat sederhana. Laporan yang disusun umumnya hanya berisi catatan penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir, tanpa disertai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam ISAK 35. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan masih terbatas. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu bendahara: *“Jadi laporan keuangan yang disusun itu cuman penerimaan dan pengeluaran”* (Wawancara, Gereja E.T Steller Barangka). Fakta ini menegaskan bahwa praktik pelaporan keuangan gereja masih berada pada level pencatatan sederhana, belum memenuhi standar entitas nonlaba.

Faktor sumber daya manusia (SDM) dan keterbatasan teknologi juga menjadi kendala utama dalam implementasi standar akuntansi. Sebagian besar bendahara belum memiliki latar belakang akuntansi yang memadai serta keterampilan dalam menggunakan perangkat digital. Beberapa gereja masih menyusun laporan secara manual dengan tulisan tangan, sementara yang lain hanya sebatas menggunakan aplikasi Excel sederhana. Kondisi ini menggambarkan adanya keterbatasan kapasitas pengelola keuangan dalam mengakses dan mengelola sistem pencatatan yang lebih kompleks. Sebagaimana diungkapkan informan: *“Ibu masih tulis tangan karena ibu bendahara juga terbatas dalam pengetahuan menggunakan laptop”* (Wawancara, Gereja Nazaret Siha).

Meskipun terdapat berbagai kendala, penelitian ini juga menemukan adanya kesiapan dan semangat dari pihak gereja untuk belajar serta mengadopsi ISAK 35. Para bendahara menunjukkan antusiasme jika diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendampingan terkait sistem akuntansi berbasis standar ini. Mereka menyadari bahwa pemanfaatan aplikasi dan sistem digital akan meningkatkan akurasi, transparansi, serta kualitas laporan keuangan gereja. Seperti diungkapkan oleh salah satu informan: *“Kalau memang ada pelatihan tentang aplikasi khusus dalam menyusun laporan keuangan, mungkin dari pihak gereja siap”* (Wawancara, Gereja Eben Haezer Manganitu). Dengan demikian, meskipun implementasi ISAK 35 masih minim, terdapat peluang besar untuk peningkatan melalui penguatan kapasitas SDM, sosialisasi sinode, serta digitalisasi sistem keuangan gereja.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dokumen laporan keuangan Gereja GMIST Eben Haezer Manganitu, GMIST Nazaret Siha, dan GMIST E.T Steller Barangka tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa laporan yang disusun masih jauh dari ketentuan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35) yang berlaku bagi entitas nonlaba. Laporan yang ditampilkan hanya berupa penerimaan dan pengeluaran kas bulanan, sehingga lebih menyerupai catatan administrasi sederhana dibandingkan laporan keuangan standar. Padahal, sebagai organisasi nonlaba, gereja memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar yang berlaku.

Secara umum, laporan keuangan gereja yang masih bersifat tradisional hanya menyajikan informasi kas masuk dan keluar, tanpa memperhatikan prinsip akrual dan tanpa adanya pemisahan dana berdasarkan sumber serta pembatasannya. Hal ini berbeda dengan laporan keuangan berbasis ISAK 35 yang menekankan pencatatan berbasis akrual, klasifikasi aset neto, serta penyajian laporan yang lebih lengkap, mencakup lima komponen utama: laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dengan demikian, ISAK 35 menghadirkan struktur yang lebih komprehensif dalam menggambarkan kondisi keuangan entitas nonlaba, termasuk gereja.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi menjadi hambatan utama implementasi ISAK 35 pada rumah ibadah (T. F. Amelia et al., 2023). Kondisi serupa juga ditemukan di GPdI Jember yang belum menerapkan ISAK 35 karena ketiadaan pelatihan teknis dari sinode (Indrawan et al., 2023), maupun di HKBP Aloban yang hanya menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran. Ketidadaan sosialisasi dari lembaga induk gereja membuat bendahara hanya menyusun laporan kas sederhana, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum tercapai sebagaimana diharapkan.

Selain itu, kendala sumber daya manusia dan teknologi turut memperburuk keterbatasan tersebut. Sebagian besar bendahara masih menggunakan pencatatan manual atau Excel sederhana, tanpa adanya pemanfaatan aplikasi khusus. Hal ini selaras dengan temuan Yahya et al. (2025) yang menekankan bahwa keterbatasan literasi teknologi memperlambat modernisasi sistem pelaporan keuangan rumah ibadah. Bahkan, masalah SDM bukan hanya terkait keterampilan teknis, melainkan juga minimnya pemahaman terminologi akuntansi. Dengan demikian, kemampuan teknis dan literasi akuntansi menjadi tantangan utama dalam adopsi ISAK 35.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya antusiasme dari pihak bendahara untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan dalam penerapan ISAK 35. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan gereja di masa depan. Sejalan dengan Piring et al. (2023), kesediaan gereja untuk berubah menunjukkan bahwa intervensi berupa edukasi, pelatihan, serta dukungan kelembagaan dari sinode akan sangat efektif dalam mendorong adopsi standar ini. Dengan dukungan sistemik yang memadai, implementasi ISAK 35 di lingkungan GMIST bukan

hanya mungkin dilakukan, tetapi juga akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan jemaat terhadap pengelolaan dana gereja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ISAK 35 pada gereja-gereja GMIST di Kecamatan Manganitu masih berada pada tahap awal dan belum optimal. Pemahaman bendahara maupun pengurus gereja terhadap standar ini masih terbatas, karena sebagian besar hanya mengenal pencatatan manual atas kas masuk dan keluar tanpa memahami konsep laporan posisi keuangan, klasifikasi aset neto, maupun basis akrual. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh minimnya latar belakang akuntansi pengelola keuangan, kurangnya pelatihan dari sinode, serta belum adanya pedoman teknis praktis untuk jemaat lokal.

Dalam praktiknya, laporan keuangan yang disusun gereja masih konvensional, hanya berupa daftar penerimaan dan pengeluaran kas. Belum ada laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, arus kas, ataupun laporan posisi keuangan sesuai standar ISAK 35. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa rumah ibadah pada umumnya belum menyusun laporan akrual dan komprehensif. Dengan demikian, kondisi keuangan gereja belum tergambar secara menyeluruh, khususnya terkait aset tetap, utang, serta pengakuan pendapatan dan beban.

Tantangan utama dalam penerapan ISAK 35 adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sistem. Sebagian besar bendahara berasal dari latar belakang non-akuntansi dan menjalankan tugasnya secara sukarela sehingga fokus pada pelaporan terbatas. Belum adanya sistem pencatatan berbasis teknologi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya pemahaman akan manfaat ISAK 35 juga menjadi kendala tambahan. Selain itu, dukungan dari sinode GMIST masih bersifat normatif dan belum diwujudkan dalam bentuk pelatihan rutin, pedoman teknis, maupun supervisi langsung terhadap laporan keuangan jemaat lokal.

Meski demikian, penelitian ini menemukan adanya komitmen dari pihak gereja untuk meningkatkan akuntabilitas. Aplikasi laporan keuangan berbasis ISAK 35 yang dikembangkan STIE SULUT diterima positif karena dianggap mampu membantu penyusunan laporan yang lebih terstruktur. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan sarana teknologi di masing-masing gereja. Oleh karena itu, dukungan dari sinode, lembaga pendidikan, serta pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan agar proses transisi menuju pelaporan berbasis ISAK 35 dapat berjalan efektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain akses data yang terbatas karena tidak semua gereja bersedia membuka dokumen keuangan secara lengkap, ruang lingkup yang hanya mencakup Kecamatan Manganitu sehingga belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain, serta keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah, menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak ISAK 35 terhadap transparansi, serta mengembangkan model pelatihan yang sesuai dengan kondisi gereja lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mendorong terciptanya pelaporan keuangan gereja yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar nasional.

REFERENSI

- Amelia, S., & Bharata, R. W. (2022). Analisis Penerapan ISAK No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Yayasan Hati Gembira Indonesia (Happy Hearts Indonesia). *Akuntansiku*, 1(4), 288–298. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.314>
- Amelia, T. F., Nurlinda, & Zuhirsyah, M. (2023). Penerapan ISAK 35 pada Laporan Keuangan Rumah Ibadah. *Polimedia*, 26(4), 63–74.
- Butar Butar, E. A., & Purba, S. (2022). Implementasi ISAK 35 Terkait Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Gereja HKBP Sidikalang II. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v1i1.1815>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Sage Publications, Inc.

- Indrawan, N., Dwi Astuti, D., & Kartika Sari, N. (2023). *Analisis Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Isak) No.35 Pada Gereja Pantekosta Di Indonesia (Gpdi) Xyz Di Kabupaten Jember*. 4(2), 1–7.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).
- Piring, S., Bawole, V., & Rumenser, P. (2023). *Implementasi ISAK No . 35 Terhadap Laporan Keuangan Gmim Kalvari Kalait Abstrak Pendahuluan Latar Belakang*. 35.
- Purba, S., Sihombing, V. C., & Andy, S. (2023). Penerapan ISAK 35 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Non- Laba pada Gereja Methodist Indonesia Gideon Bunut. *Jurnal IAKP*, 4(2), 121–126.
- Reza, A. M., Wahyuni, L. A., & Nurwadi. (2024). *Analisis Penerapan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Mhd*. 18(35), 2508–2521.
- Setiadi. (2021). *Implementasi Isak 35 (Nir Laba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus)*. 6(2), 94–107.
- Siregar, L., Nurlaila, & Inayah, N. (2023). *Penerapan Isak 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. 2(2).
- Sukmantoro, P. I., & Ekawati, E. (2021). Penerapan PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan Nirlaba di Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung (The Implementation of PSAK No. 45 on Non-Profit Financial Statements at the Lampung Putri Diniyyah Education Foundation). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 40–64. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.500>
- Turangan, G. J., Putong, I. H., & Tangon, J. N. (2022). Implementasi ISAK No . 35 Atas Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus pada GMIM Bethesda Tatelu). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3753–3762.
- Wirakrama, G. A. W., Aspirandi, R. M., & Afroh, I. K. F. (2023). Analisis penerapan isak nomer 35 pada yayasan jember berbagi berkah bersama. *Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2).
- Yahya, M. R., Dapi, M. D., & Karim, N. A. (2025). *Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Sekecamatan Mapanget Berdasarkan Isak 35*. 4(8), 1749–1756.